



LAPORAN KINERJA

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

TAHUN 2025

**PEMERINTAH KOTA TARA KAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025 dapat disusun sesuai waktu yang ditentukan .

Penyusunan LKIP dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Tarakan kepada para pemangku kepentingan atas amanah yang diberikan dalam pengelolaan seluruh sumber daya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025. Tujuan penyusunan LKIP untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang direncanakan dan kinerja yang dicapai, sehingga dapat digunakan perbaikan untuk peningkatan kinerja secara berkesinambungan .

Teknis penyusunan LKIP mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2024 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu :

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber daya Aparatur dan Isu Strategis
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan
- Bab IV Penutup.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif segenap jajaran aparat pemerintah daerah dalam penyusunan LKIP dan dukungan instansi lain serta masyarakat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridho, sehingga upaya mewujudkan Masyarakat Tarakan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Berbudaya dapat lebih cepat tercapai.

Wassalaamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Tarakan, Januari 2026

KEPALA DINAS



ENDAH SARASTININGSIH, S.Pd., M.Pd
NIP 197010251994012001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada visi dan misi Kota Tarakan dan Indikator Kinerja Utama yang merujuk pada RPJMD 2025-2029 **Misi 4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota, Tujuan 4 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan sasaran 12 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik**. Maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merumuskan Tujuan yaitu : **“Meningkatnya Tata Kelola dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik”**.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025 berdasarkan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran sebesar **100,16 %**. Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RENSTRA (Perangkat Daerah) Kota Tarakan yang diperjanjikan pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 6.714.447.242,-** dengan realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 6.161.868.467,-** atau 91,77 % .

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 5 sasaran yang mencakup 6 indikator sasaran, diketahui bahwa Rata-rata realisasi **capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100,16 %**, dengan uraian : 6 sasaran dengan predikat kinerja sangat tinggi .

Dengan melihat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada sasaran dan tujuan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 dalam rangka penyempurnaan kinerja yang lebih baik. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan sekarang dan masa datang.

**Tim Penyusun LKIP
Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Tahun 2025**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aparat Pemerintah	11
D. Isu Strategis	14

BAB II

PERENCANAAN KINERJA	22
A. Visi Kota Tarakan 2025-2029	23
B. Misi Kota Tarakan 2025-2029	23
C. Tujuan dan Sasaran	24
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
E. Indikator Kinerja Utama	27

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Pengukuran Kinerja	30
B. Analisis Pengukuran Kinerja	32
C. Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran	52
D. Daftar Penghargaan	61

BAB IV

PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Tindak lanjut rekomendasi	66

LAMPIRAN

1. Ringkasan DPA Perubahan Tahun 2025
2. Rekapitulasi Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
3. LRA Tahun 2025
4. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
5. Surat Pernyataan Telah Direviu Oleh Inspektorat
6. Lembar Asistensi Laporan Kinerja (LKIP) Perangkat Daerah Tahun 2025
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta rewiu dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.



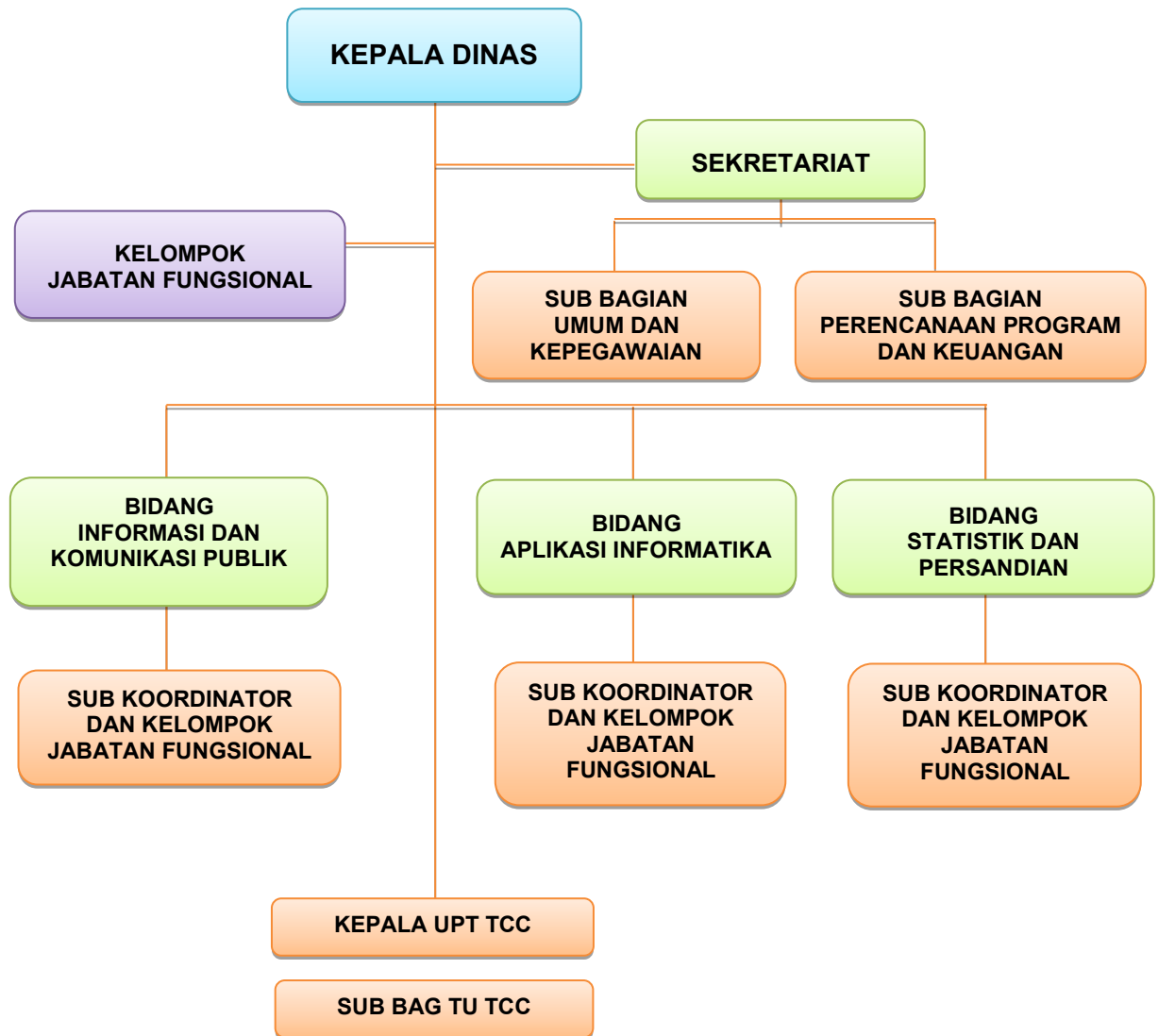
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan selaku unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika serta Statistik dan Persandian, dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan : (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis 2025-2029; (2) Rencana Kerja Tahun 2025, dan (3) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6 (enam) Sub Koordinator (Eselon IVa), 1 (satu) Kepala UPT TCC (Eselon IVa) dan 1 (satu) Kasubbag TU TCC (Eselon IVb). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap disajikan sebagai berikut :



**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TARAkan**



Gambar 1. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



Uraian tugas dan fungsi pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik dan Persandian
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah
7. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;



4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

b. Sekretariat

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas .

Sekretariat dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. koordinasi kegiatan Dinas;
2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dokumentasi Dinas;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan



Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. monitoring opini dan aspirasi publik;
3. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. pengelolaan media komunikasi publik;
5. pelayanan informasi publik;
6. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
7. koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
8. layanan hubungan media;
9. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
10. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
11. manajemen komunikasi krisis;
12. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
13. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
14. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan



15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Bidang Aplikasi Informatika

1. Bidang Aplikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang aplikasi Informatika di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem *smart city*;
4. Pengelolaan *E-Government* dilingkup Pemerintah Daerah;
5. Pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)
6. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepada Bidang Aplikasi Informatika



e. Bidang Statistik dan Persandian

1. Bidang Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang statistik dan persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan



informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. UPT *Tarakan Command Center (TCC)*

Dasar pembentukan UPT *Tarakan Command Center* berdasarkan Perwali Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana



Teknis Dinas *Tarakan Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

1. UPT *Tarakan Command Center* merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan .
2. UPT *Tarakan Command Center* dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .

UPT *Tarakan Command Center* mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan tugas UPT *Tarakan Command Center* juga menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan UPT dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3. Pelaksanaan layanan *call center 112*
4. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi layanan *call center 112*
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya



8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

C. Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugasnya menangani urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas. Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka SDM merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Aparat Pemerintah yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

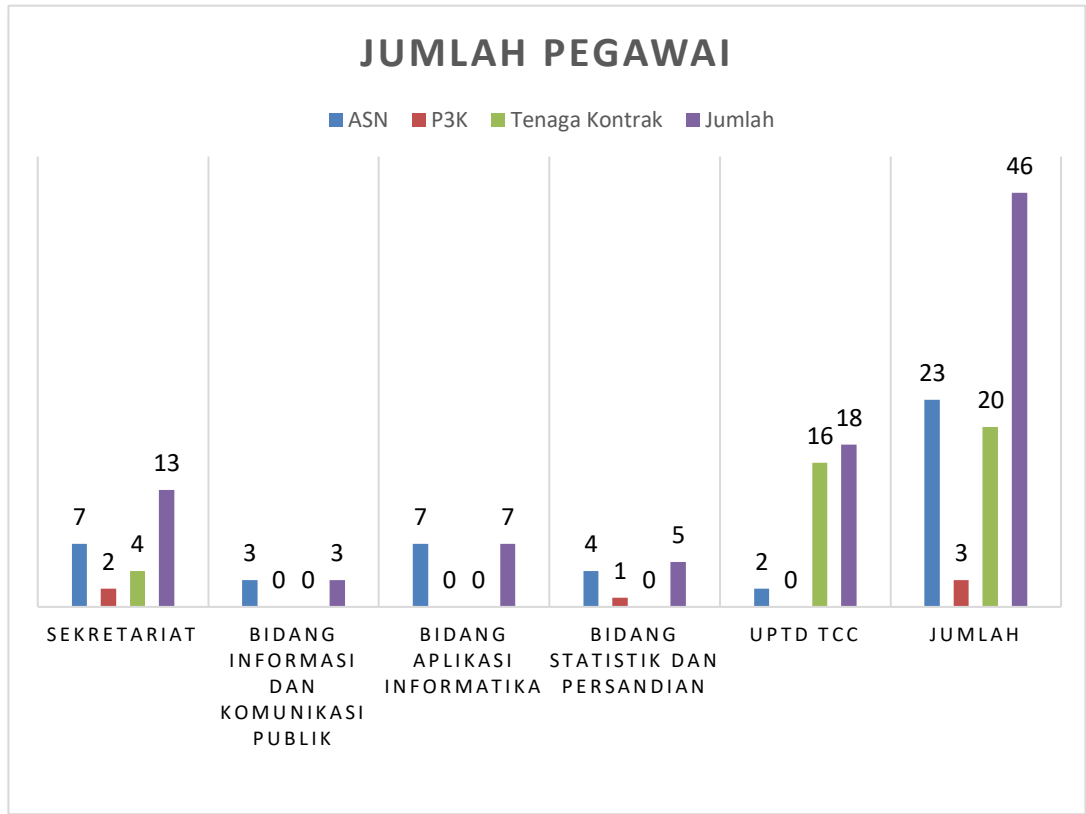
Tabel II.1. Jumlah Pegawai

Sekretariat / Bidang	PNS	P3K	Tenaga Kontrak	Jumlah
a. Sekretariat	7	2	4	13
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	3	-	-	3
c. Bidang Aplikasi Informatika	7	-	-	7
d. Bidang Statistik dan Persandian	4	1	-	5
e. UPT TCC	2	-	16	18
Jumlah	23	3	20	46

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan



Gambar II.1. Grafik Jumlah Pegawai

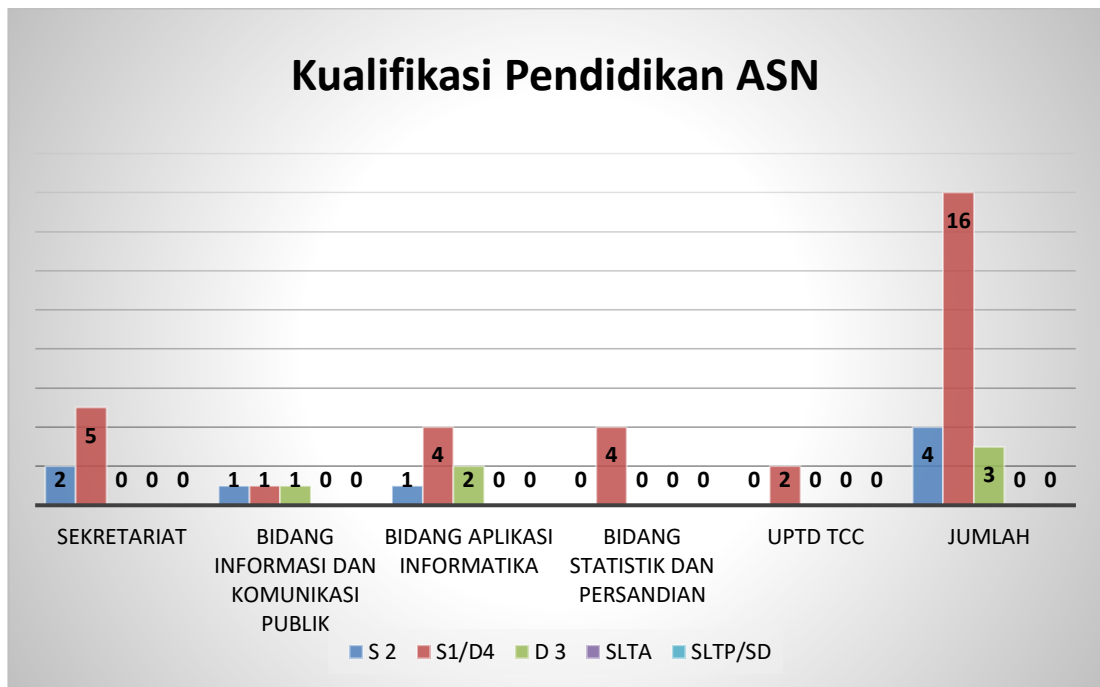


Tabel II.2. Kualifikasi Pendidikan Pegawai (PNS, P3K dan Tenaga Kontrak)

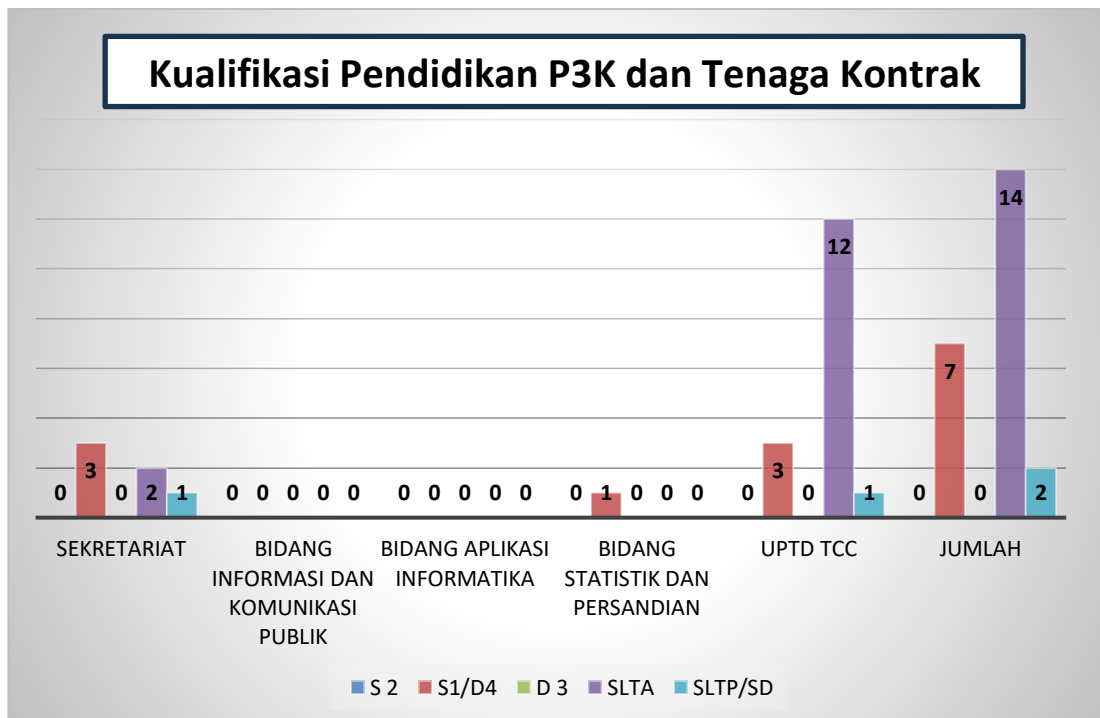
Sekretariat / Bidang	S 2			S1/D4			D 3			SLTA			SLTP/SD			Jumlah
	PNS	P3K	PTT	PNS	P3K	PTT	PNS	P3K	PTT	PNS	P3K	PTT	PNS	P3K	PTT	
a. Sekretariat	2	-	-	5	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	13
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
c. Bidang Aplikasi Informatika	1	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7
d. Bidang Statistik dan Persandian	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
e. UPT TCC	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	12	-	-	1	18
Jumlah	4	-	-	16	3	4	3	-	-	-	-	14	-	-	1	46



Gambar II.2. Grafik kualifikasi Pendidikan ASN



Gambar II.3. Grafik kualifikasi Pendidikan P3K dan Tenaga Kontrak



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan



D. ISU STRATEGIS

Demi mewujudkan Visi Kota Tarakan tahun 2025 – 2029, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mengangkat beberapa isu strategis bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik
2. Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral serta;
4. Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah .

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam melaksanakan tupoksinya :

1. Belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government,
2. Belum optimalnya pemanfaatan website milik pemerintah kota maupun OPD untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas;
3. Cakupan sebaran dan kualitas pantauan dari CCTV yang belum optimal
4. Belum optimalnya penyiapan dan pemanfaatan SDM yang berhubungan dengan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
5. Belum optimalnya sarana prasarana infrastruktur bagi penyebarluasan informasi publik, statistik sektoral dan pengamanan informasi pemerintah kota;



6. Belum optimalnya Implementasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan layanan pengaduan SP4N Lapar;
7. Belum optimalnya Layanan Tarakan Command Center

Dari permasalahan diatas diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan, yaitu :

1. Tataran kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

Implementasi *E-Government* belum sepenuhnya diterapkan pada pengelolaan dan layanan pemerintahan Kota Tarakan

2. Implementasi program dan kegiatan pada bidang/unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan, sebagai berikut :

- a. Aplikasi yang tersedia saat ini belum sepenuhnya terintegrasi
- b. Layanan infrastruktur jaringan belum mencakup seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kota Tarakan
- c. Pelayanan kepada masyarakat baik yang bersifat layanan publik maupun layanan informasi belum seluruhnya berbasis *E-Government*, sehingga layanan publik yang cepat, mudah, tepat dan transparan belum sepenuhnya dapat dipenuhi.



3. Teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, sebagai berikut :

- a. Kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknis masih belum tercukupi sehingga perlu pengembangan sumberdaya aparatur yang menguasai teknologi informasi dan jurnalistik, belum memadai dari segi skill dalam pengelolaan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
- b. Layanan jasa (Teknologi Informasi dan Komunikasi belum optimal khususnya *Bandwidth* untuk seluruh OPD
- c. Sinergisitas Pemerintah Kota dan media perlu dibangun maksimal untuk mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab
- d. Belum optimalnya layanan informasi dan pengaduan masyarakat berbasis IT
- e. Belum tersedianya Pusat Data (data center) yang menyediakan data sektoral Kota Tarakan
- f. Peningkatan Layanan Publik Kegawat daruratan melalui UPT TCC masih perlu ditingkatkan
- g. Belum terlaksananya sistem keamanan informasi oleh Pemerintah Kota

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal yang mempengaruhi (Perangkat Daerah) Kota Tarakan antara lain :



1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja adalah :

1. Peraturan dan kebijakan Pemerintah Pusat yang berubah sehingga Pemerintah Daerah dituntut untuk menyesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
2. Teknologi yang berkembang sangat cepat sehingga perlu adaptasi yang cepat pula dari SDM, kebijakan dan tata kelola pemerintahan
3. Dukungan anggaran yang belum memadai untuk kegiatan yang mendukung program unggulan Pemerintah Kota Tarakan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Kota Tarakan dalam kurun waktu 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi



yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah kota dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

2. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional reengineering*) yang ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan



manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*. Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

3. Peningkatan Layanan Publik berbasis Informasi Teknologi

Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri berpengaruh signifikan terhadap pola pelayanan kepada masyarakat. Layanan publik saat ini harus berorientasi pada layanan publik yang cepat, mudah, tepat, dan transparan . Dengan semakin meluasnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah juga harus memanfaatkannya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, atau yang lebih kita kenal dengan istilah *E-Government* tersebut, sebaiknya bukan hanya sekadar mengikuti tren global, melainkan juga merupakan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat.



E-Government dapat mempermudah masyarakat mengakses berbagai informasi dan mendapat berbagai pelayanan tanpa harus datang langsung ke institusi pemerintahan terkait. Keterbukaan informasi juga akan mendorong terciptanya good governance dalam pemerintahan karena meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga publik. Selain itu, *E-Government* juga diharapkan dapat memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, salah satu contoh penerapan *E-Government* melalui sistem Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) terbukti menghasilkan efisiensi. Dengan penerapan satu jenis layanan berbasis *E-Government* saja pemerintah sudah dapat merasakan manfaatnya, khususnya dari segi efisiensi.

Ada beberapa poin penting yang perlu ditingkatkan dalam penerapan *E-Government* di Kota Tarakan :

Pertama, pemasifan *E-Government* Demi pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik, semua OPD harus menerapkan *E-Government*. Untuk itu, infrastruktur, meliputi infrastruktur fisik, jaringan, maupun SDM juga harus dipersiapkan.

Kedua, standardisasi *E-Government* perlu adanya suatu standardisasi yang jelas dalam pelaksanaannya agar kebijakan pengembangan *E-Government* dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu di semua OPD.

Ketiga, integrasi *E-Government*, pengembangan sistem *E-Government* diperlukan kerangka komunikasi antarsistem *E-Government* di semua OPD untuk saling berhubungan dan bekerja sama. Dalam implementasinya, perlu ada mekanisme komunikasi baku antarsistem, sehingga masing-masing sistem



aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk *E-Government services* yang lebih besar dan kompleks.

Keempat, sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota harus melakukan kampanye pemasaran, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka sadar tentang keberadaan dan manfaat *E-Government*.

Kelima, hal terakhir yang harus dilaksanakan adalah Pemerintah perlu terus mengevaluasi tingkat penerimaan publik, kepuasan masyarakat terhadap layanan *E-Government*, serta frekuensi dan intensitas penggunaan *E-Government*. Evaluasi ini penting agar pemerintah dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya sehingga dapat terus memberikan pelayanan publik yang prima.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Kota Tarakan. Rencana Strategis yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis (Perangkat Daerah) Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra (Perangkat Daerah) Kota Tarakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, antar SKPD dan *stakeholder*.



Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

Didalam Renja dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A. Visi Pemerintah Kota Tarakan 2025-2029

“ Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera “

B. Misi Pemerintah Kota Tarakan 2025-2029

Dalam mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana



C. Tujuan dan Sasaran DKISP

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Adapun tujuan dan sasaran DKISP adalah:

Tujuan :

“ Meningkatkan Tata Kelola Dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik “

Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu :

- Sasaran 1 : Meningkatkan penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik
- Sasaran 2 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik
- Sasaran 3 : Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik
Sektoral
- Sasaran 4 : Meningkatkan Pengamanan Informasi Digital Pemerintah
Daerah
- Sasaran 5 : Meningkatkan tata kelola DKISP



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi Kota Tarakan : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera

No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal (2024)	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target Akhir	
Misi 4 Kota Tarakan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota														
1	Meningkatnya Tata Kelola Dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik		1	Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	1	Indeks domain tata Kelola SPBE	poin	2,70	2,70	2,80	2,80	2,90	2,90	
			2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	3	Indeks Pembangunan Statistik	poin	2,25	2,25	2,3	2,35	2,4	2,5	
			4	Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	4	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			5	Meningkatnya Tata Kelola DKISP	5	Nilai dan predikat SAKIP	Poin/ Grade	71,55/ BB	79,55/ BB	79,60/ BB	79,65/ BB	79,70/ BB	79,75/ BB	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin/ Grade			88,00/ BB	88,64/ A	88,70/ A	88,72/ A	88,75/ A	88,83/ A				



Tabel 2.2
Keterkaitan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kota Tarakan 2025-2029

Fungsi Dinas	Misi dan Tujuan Kota Tarakan	Sasaran Kota Tarakan	Strategi Kota Tarakan	Arah Kebijakan Kota Tarakan
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	<p style="text-align: center;">Misi 4 :</p> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota	<p style="text-align: center;">Sasaran 12 :</p> Meningkatnya kualitas pelayanan publik	<p style="text-align: center;">Strategi 1 :</p> Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan informasi dan komunikasi publik <p style="text-align: center;">Strategi 5 :</p> Pengembangan layanan berbasis digital <p style="text-align: center;">Strategi 6 :</p> Peningkatan manajemen keamanan informasi dan jaringan <p style="text-align: center;">Strategi 8 :</p> Peningkatan dukungan data statistik dalam proses perencanaan pembangunan	<p style="text-align: center;">Arah Kebijakan 1 :</p> Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan <p style="text-align: center;">Arah Kebijakan 2 :</p> Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan <p style="text-align: center;">Arah Kebijakan 6 :</p> Pemantauan, Evaluasi, dan Transparansi Kebijakan
	<p style="text-align: center;">Tujuan 4 :</p> Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan			

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen RENSTRA Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2025, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA TARAKAN**

No.	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	1	Indeks domain tata Kelola SPBE	2,70
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	3	Indeks Pembangunan Statistik	2,25
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	4	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan TTE	100%
5	Meningkatnya Tata Kelola DKISP	5	Nilai dan predikat SAKIP	79,55/BB
		6	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,64/A

E. Indikator Kinerja Utama

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis (Perangkat Daerah), perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama, berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terdapat 5 (tiga) sasaran strategis PD dengan 6 (enam) indikator kinerja . Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Target	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	1	Indeks domain tata Kelola SPBE	Nilai Indeks domain tata Kelola SPBE	poin	2,70	Laporan Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bidang Aplikasi Informatika
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	$\frac{\sum \text{permohonan yang diselesaikan}}{\sum \text{permohonan informasi}} \times 100 \%$	%	100%	Laporan Evaluasi SP4N Lapor	Bidang Informasi dan Komunikasi
Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	3	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	poin	2,25	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)	Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	4	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan TTE	$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan TTE}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$	%	100%	Laporan Capaian Pengukuran Kinerja	Bidang Statistik dan Persandian
Meningkatnya Tata Kelola DKISP	5	Nilai dan predikat SAKIP	Nilai dan predikat SAKIP	%	79,55/BB	LHE SAKIP oleh Inspektorat	Sekretariat
	6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin/ Grade	88,64/BB	Laporan IKM	Sekretariat



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan diatas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025.



Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah.

Pelaporan kinerja Tahun 2025, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Pengguna Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh DKISP.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut :

Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	90 \geq 100	Sangat Tinggi
2	76 s/d < 90	Tinggi
3	66 s/d < 75	Sedang
4	51 s/d < 65	Rendah
5	0 s/d < 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017



Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel

3.1 berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja DKISP Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks domain tata Kelola SPBE	2,70	2,70	100,00 %
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00%	100,00%	100,00 %
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,25	2,25	100,00 %
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan TTE	100,00%	100,00%	100,00 %
5	Meningkatnya Tata Kelola DKISP	Nilai dan predikat SAKIP	79,55/BB	80,30/A	100,94 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,64/A	88,67/A	100,03 %
CAPAIAN KINERJA					100,16 %

Pencapaian kinerja 5 sasaran dengan 6 indikator tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah
1	90 ≥ 100	Sangat Tinggi	6
2	76 s/d < 90	Tinggi	-
3	66 s/d < 75	Sedang	-
4	51 s/d < 65	Rendah	-
5	0 s/d < 50	Sangat Rendah	-
Total Indikator Kinerja			6



B. Analisis Pengukuran Kinerja

Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik

Sasaran 1	:	Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik
Indikator Kinerja	:	Indeks domain tata Kelola SPBE

Indeks domain tata kelola SPBE diperoleh dari nilai hasil Laporan Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia .

Dari hasil penilaian Indeks domain tata kelola SPBE (Domain 2/D2) diperoleh nilai 2,70 dengan predikat “Baik” sebagaimana interval nilai indeks berikut :

No	Interval Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Untuk menghitung capaian kinerja Indeks domain tata kelola SPBE (D2) menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Indeks domain tata kelola SPBE (D2)}}{\text{Target Indeks domain tata kelola SPBE (D2)}} \times 100 \%$$



Berdasar target yang di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah 2,70 sehingga dengan hasil yang diperoleh capaian kinerja Indeks domain tata kelola SPBE (D2) mencapai 100 %

Sebagai perbandingan hasil yang diperoleh jika di sandingkan dengan perolehan nilai dari kabupaten dan kota serta provinsi di wilayah Kalimantan Utara disajikan pada tabel berikut :

No	Nama Instansi	D1	D2	D3	D4	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	5,00	3,50	1,45	4,45	3,79	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab. Bulungan	3,90	3,30	2,82	4,68	3,93	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Malinau	1,80	1,70	1,18	3,50	2,45	Cukup
4	Pemerintah Kab. Nunukan	2,80	2,50	1,00	3,81	2,89	Baik
5	Pemerintah Kab. Tana Tidung	2,30	2,50	1,09	3,81	2,84	Baik
6	Pemerintah Kota Tarakan	2,70	2,70	1,73	3,95	3,11	Baik

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 1 yaitu :

Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan : Pengelolaan *E-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah



2. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
3. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

Total anggaran yang tersedia untuk Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp 799.759.140,- dengan beberapa item kegiatan yang dilaksanakan antara lain disajikan pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Sewa jaringan internet CCTV	36.000.000	12 bulan
2.	Pemeliharaan Jaringan, CCTV dan Kelengkapan Pendukung TCC	20.252.660	12 bulan
3.	Jasa Uang Makan Petuga Call Center 112	109.620.000	12 bulan
4.	Belanja modal CCTV Outdoor 8 MP dan Mikrotik (6 unit)	18.600.000	3 unit cctv dan 3 unit mikrotik
5.	Pengembangan Software Aplikasi	100.000.000	1 paket
6.	Belanja scanner	5.813.500	1 unit
7.	Sewa bandwidth NOC dan data center	191.808.000	12 bulan
8.	Sewa domain hosting, call center 112, lisensi id zoom dan panel web base	218.200.000	12 bulan
9.	Belanja computer dan printer	24.738.100	1 unit computer dan 2 unit printer

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :



1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti :
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (**SPBE**)
2. Visi Kota Tarakan mewujudkan Kota Tarakan yang maju dan sejahtera melalui *Smart City* sehingga banyak kegiatan/layanan publik yang dilaksanakan dengan sistem elektronik dan tentunya hal ini sangat membutuhkan ketersediaan jaringan dan bandwidth server yang memadai
3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga Program/Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

Berikut tabel target dan realisasi anggaran tahun 2025 pada program dan sub kegiatan penunjang sasaran 1 :

Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Program Aplikasi Informatika	799.759.140	752.096.399	94,04
1. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	223.980.740	197.820.469	88,32
2. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	127.679.900	109.818.400	86,01
3. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	448.098.500	444.457.530	99,19

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2025

Untuk tahun 2025 terdapat perubahan indikator pada bidang Aplikasi Informatika menyesuaikan dengan Renstra 2025-2029 dan hasil



rekomendasi LHE Sakip oleh Inspektorat Kota Tarakan dari yang semula Persentase OPD yang terkoneksi bandwidth server menjadi Indeks Domain Tata Kelola SPBE sehingga bisa dijadikan benchmarking atau perbandingan hasil realisasi capaian PD dengan realisasi di tingkat provinsi dan nasional .

Perbandingan target dan realisasi tahun 2025 serta target capaian jangka menengah Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2025			Target Renstra	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,70	2,70	100 %	2,90	100 %

Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik

Indikator : Persentase penyelesaian permohonan informasi publik

Persentase penyelesaian permohonan informasi publik adalah perbandingan jumlah permohonan yang diselesaikan dengan jumlah permohonan informasi dikalikan seratus persen sebagaimana rumus berikut :

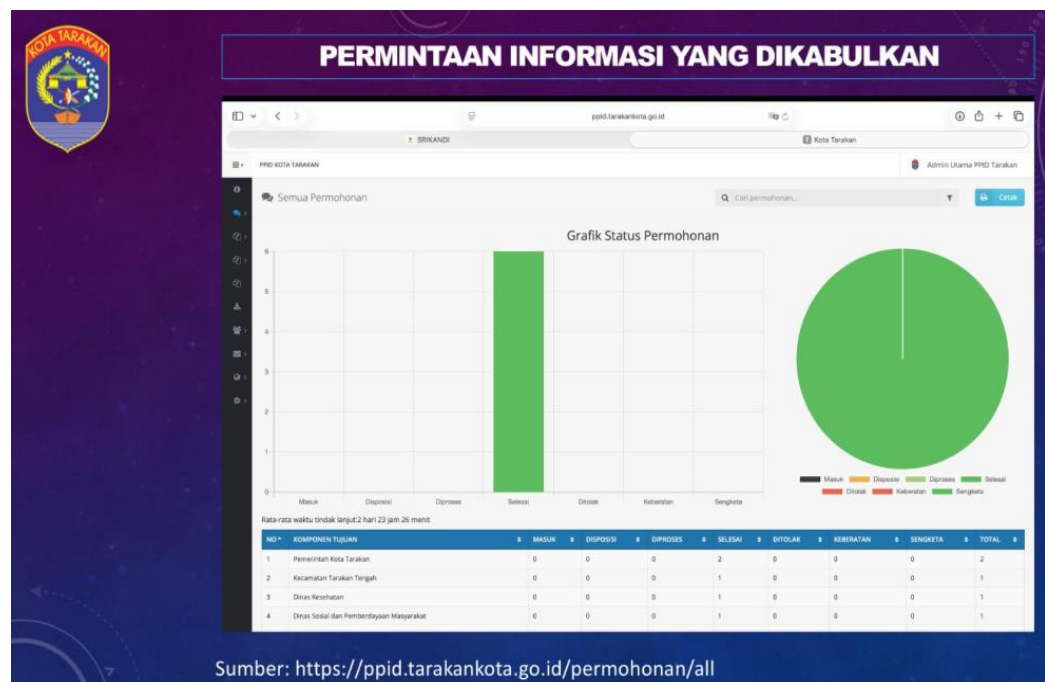
$$\frac{\sum \text{permohonan yang diselesaikan}}{\sum \text{permohonan informasi}} \times 100 \%$$

Didasari oleh Undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor



19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah .

Tahun 2025 dari 6 permohonan informasi semuanya telah diselesaikan atau capaian kinerja mencapai 100 % sebagaimana tergambar dari screen shoot aplikasi PPID berikut ini :



Sumber: <https://ppid.tarakankota.go.id/permohonan/all>

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 2 :

Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Kemitraan komunitas dengan komunitas informasi masyarakat



Sub Kegiatan : Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik

Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Total anggaran yang tersedia untuk Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp 1.039.241.700,- dengan beberapa item kegiatan yang dilaksanakan antara lain disajikan pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Belanja Diseminasi dan Publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada media cetak/elektronik/online	765.000.000	Publikasi Iklan/Reklame/Advertorial pada media cetak, elektronik, online di media local, regional dan nasional
2.	Pembuatan video Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	50.000.000	Kerja sama dengan pihak 3 untuk pembuatan video promosi dan Pembangunan Kota Tarakan
3.	Belanja perjalanan dinas	25.801.900	kegiatan peliputan dan koordinasi
4.	Belanja cetak publikasi	52.555.000	Cetak cover baleho dan spanduk untuk bahan publikasi
5.	Bongkar pasang cover baleho	26.600.000	Biaya untuk bongkar dan pasang cover baleho sebanyak 38 item/buah
6.	Belanja konsumsi rapat	9.300.000	kegiatan PPID dan SP4N Lapor
7.	Belanja konsumsi rapat	6.780.000	Rapat kegiatan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
8.	Belanja Hibah	50.000.000	Hibah kepada organisasi PWI

Berikut tabel target dan realisasi anggaran tahun 2025 pada program dan sub kegiatan penunjang sasaran 2 :

Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Pengelolaan Informasi dan	1.039.241.700	1.014.919.302	97,66



Komunikasi Publik			
1. Kemitraan komunitas dengan komunitas informasi masyarakat	56.780.000	56.723.500	99,90
2. Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	33.066.600	24.662.750	74,59
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	949.395.100	933.533.052	98,33

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2025

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah seperti : Undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 19 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. Sinergitas Pemerintah dan media telah dibangun maksimal untuk mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan bertanggungjawab sehingga penerapan layanan informasi melalui media dapat membantu masyarakat untuk memahami informasi kegiatan pembangunan daerah.
3. Dukungan anggaran dan kebijakan dari Pemerintah Kota yang optimal sehingga layanan informasi dan dokumentasi dapat dilaksanakan dengan baik



Berikut ini perbandingan target dan realisasi tahun 2025 serta target capaian jangka menengah Renstra 2025-2029 :

Indikator Kinerja	2025			Target Renstra	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sasaran 3	:	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektor
Indikator	:	Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik diperoleh dari Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Tarakan adalah **2,25** dengan kategori “**cukup**” .

Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang



Untuk penilaian Indeks Pembangunan Statistik dilaksanakan setiap 2 tahun sehingga hasil yang ditampilkan dalam LKIP ini adalah perolehan atas penilaian tahun 2024 .

Jika dibandingkan nilai Indeks Pembangunan Statistik yang diperoleh masih di bawah nilai nasional yaitu 2,35 dan nilai harapan yaitu 2,60 sebagaimana tabel berikut :

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,75
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,81
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	1,79
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,65
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,13
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,25

Untuk menghitung capaian kinerja Indeks Pembangunan Statistik menggunakan rumus : :

$$\frac{\text{Indeks Pembangunan Statistik}}{\text{Target Indeks Pembangunan Statistik}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) nilai Indeks Pembangunan Statistik Kota Tarakan diperoleh nilai 2,25 dari target yang ditetapkan



dalam perjanjian kinerja sebesar 2,25 yang berarti capaian kinerja untuk sasaran 3 adalah 100,00 % .

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 3 :

- Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Peningkatan kualitas statistik sektoral
- Sub Kegiatan : Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar

Alokasi Anggaran untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Rp sebesar 62.706.000,- dengan beberapa item kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Belanja kegiatan Satu Data Indonesia (SDI)	11.987.500	Konsumsi rapat dan honor nara sumber kegiatan SDI
2.	Belanja kegiatan monitoring dan evaluasi wali data	9.000.000	Konsumsi rapat dan honor nara sumber kegiatan wali data
3.	Belanja honorarium tim kegiatan	32.137.500	Honorarium tim pengumpulan, verifikasi dan pengolah data Perangkat Daerah
4.	Cetak Buku Data Statistik Sektoral Kota Tarakan 2025	734.000	Cetak buku dengan sumber data dari BPS dan hasil Kompilasi Data Sektoral Kota Tarakan



5.	Belanja kegiatan Probis statistik sektoral	4.344.500	Konsumsi rapat, cetak dan honor nara sumber kegiatan penyusunan proses bisnis statistik sektoral
----	--	-----------	--

Berikut tabel target dan realisasi anggaran tahun 2025 pada program dan sub kegiatan penunjang sasaran 3 :

Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	62.706.000	56.469.840	90,05
1. Peningkatan kualitas statistik sektoral	12.129.000	11.288.500	93,07
2. Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	46.232.500	41.306.340	89,34
3. Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	4.344.500	3.875.000	89,19

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya peraturan/kebijakan dari Pemerintah Pusat seperti : Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
2. Dilaksanakannya Forum Komunikasi Statistik Daerah (FKSD) sebagai upaya penyamaan persepsi dalam penyusunan Metadata Variabel Statistik Sektoral
3. Dukungan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan sebagai mitra dan penyedia data statistik

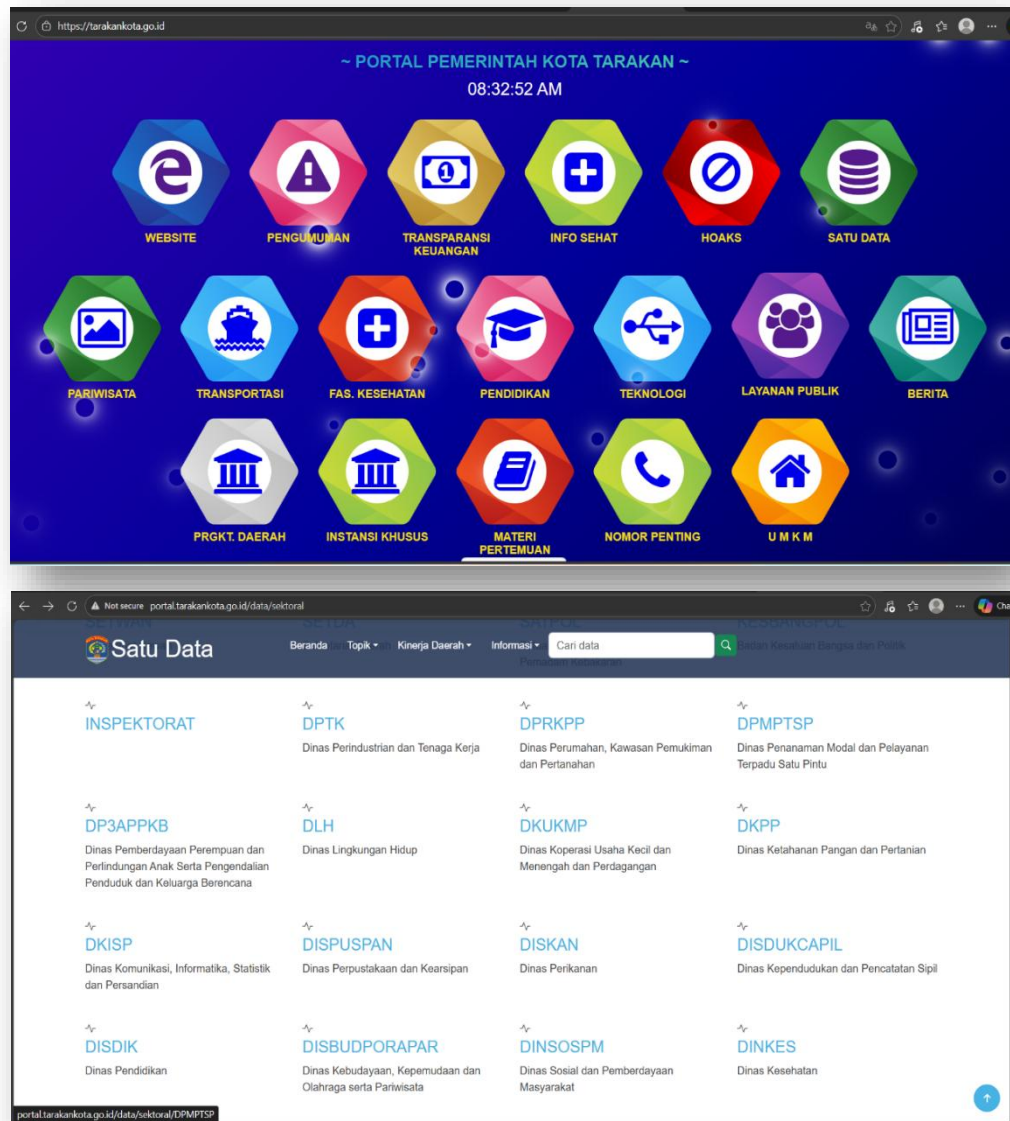
Sementara dari hasil kompilasi pengumpulan data telah dipublikasikan melalui pembuatan buku Data Statistik Sektoral Kota



Tarakan Tahun 2025 dan soft file dapat dilihat di portal

<http://portal.tarakankota.go.id/data/sektoral>

Berikut tampilan Data Statistik Sektoral Kota Tarakan dalam portal :



Untuk tahun 2025 terdapat perubahan indikator pada bidang statistik menyesuaikan dengan Renstra 2025-2029 dan hasil rekomendasi LHE Sakip oleh Inspektorat Kota Tarakan dari yang semula Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral menjadi Indeks Pembangunan Statistik sehingga bisa dijadikan benchmarking



atau perbandingan hasil realisasi capaian PD dengan realisasi di tingkat provinsi dan nasional .

Berikut ini perbandingan target dan realisasi tahun 2025 serta target capaian jangka menengah Renstra 2025-2029 :

Indikator Kinerja	2025			Target Renstra	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Pembangunan Statistik	2,25	2,25	100 %	2,50	100 %

Sasaran 4	: Meningkatkan Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah
Indikator	: Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE

Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE adalah perbandingan jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE dengan jumlah Perangkat Daerah dikalikan seratus persen sebagaimana rumus berikut :

$$\frac{\sum \text{Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE}}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil laporan capaian pengukuran kinerja organisasi jumlah Perangkat Daerah yang telah mengimplementasikan TTE sebanyak 30 Perangkat Daerah dari target yang ditetapkan dalam



perjanjian kinerja sebesar 30 Perangkat Daerah yang berarti capaian kinerja untuk sasaran 4 adalah 100,00 % .

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 4 sebagai berikut :

- Program : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Alokasi Anggaran untuk Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rp sebesar 10.355.000,- dengan beberapa item kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Rapat Penyusunan dan atau Sosialisasi SOP Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	4.060.000	Konsumsi rapat dan honor nara sumber kegiatan
2.	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	2.107.500	Belanja perjalanan dinas dalam Provinsi
3.	Evaluasi Penyelenggaraan Pengamanan Informasi melalui Persandian	4.187.500	Konsumsi rapat, cetak spanduk dan honor nara sumber kegiatan



Berikut tabel target dan realisasi anggaran tahun 2025 pada program dan sub kegiatan penunjang sasaran 4 :

Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	10.355.000	9.207.500	88,92
1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.167.500	5.782.500	93,76
2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4.187.500	3.425.000	81,79

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target antara lain :

1. Adanya Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah
2. Implementasi tata laksana kearsipan melalui aplikasi Srikandi dimana salah satu persyaratannya adalah menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE)
3. Dukungan dari seluruh Perangkat Daerah dalam pengimplementasian Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Perbandingan target dan realisasi tahun 2025 serta target capaian jangka menengah Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	2025			Target Renstra	
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator 1 : Nilai/Predikat Sakip
Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator 1 : Nilai/Predikat Sakip

Nilai/Predikat Sakip adalah nilai atau predikat dari Laporan Hasil Evaluasi Sakip yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tarakan .

Untuk capaian kinerja Nilai Sakip Tahun 2025 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{nilai LHE Sakip}}{\sum \text{target yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Tarakan pada aplikasi e-sakip pro (<https://tarakan.esakip.pro>) nilai Sakip DKISP adalah 80,30 atau dengan predikat A dari target yang ditetapkan sebesar 79,55/BB atau tingkat capaian sebesar 100,94 %, penyebab tercapainya target LHE Sakip antara lain :

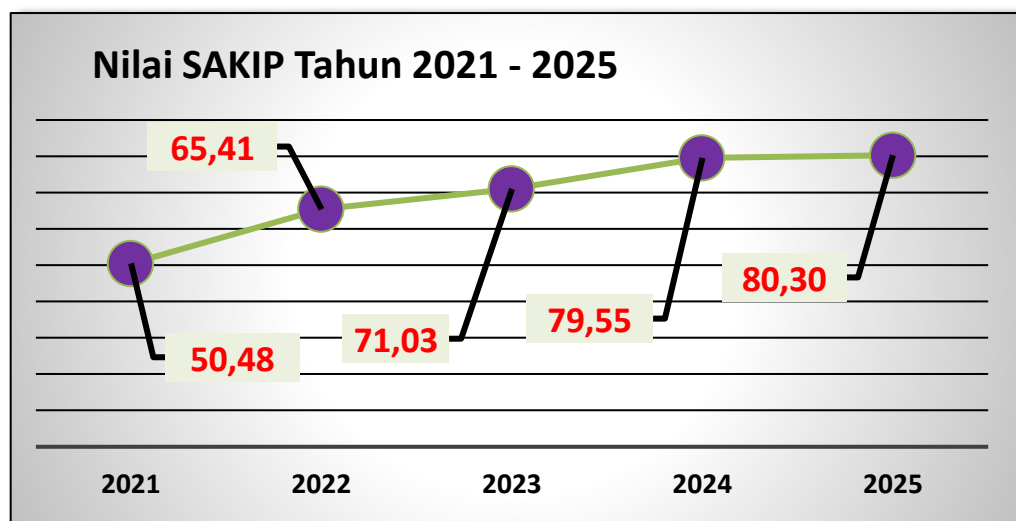
1. Penetapan Target Keberhasilan sesuai dengan Indikator Tujuan.
2. Dokumen perencanaan dan keuangan telah dipublikasikan pada Website resmi PD atau Website Pemerintah Kota Tarakan yang dapat memudahkan publik/masyarakat untuk mengakses .
3. Evaluasi internal telah dilaksanakan dan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
4. Dokumen LKIP didukung basis data yang kompeten yang dapat diverifikasi, ditelusuri sumber datanya dan *up to date* .



Target dan Realisasi Nilai Sakip dalam 5 tahun terakhir (2021-2025) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Tahun	Target Nilai/Predikat	Realisasi Nilai/Predikat	Keterangan
1.	2021	65/B	50.48/CC	Cukup
2.	2022	70/B	65.41/B	Baik
3.	2023	70/B	71,03/BB	Sangat Baik
4.	2024	79,55/BB	79,55/BB	Sangat Baik
5.	2025	79,55/BB	80,30/A	Memuaskan

Sumber data : LHE Sakip Tahun 2021 – 2025



Sumber data : LHE Sakip Tahun 2021 – 2025

Perbandingan target dan realisasi tahun 2021-2025 serta target capaian jangka menengah Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi				2025			Target Renstra	
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Nilai/Predikat Sakip	50,48 CC	65,41 B	71,03 BB	79,55 BB	79,55 BB	80,30 A	100,94 %	79,75 A	100 %



Indikator 2 : Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah nilai atau predikat dari Laporan IKM berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan . Untuk capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{nilai Indeks Kepuasan Masyarakat}}{\sum \text{target yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Berdasarkan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan DKISP adalah 88,67 atau dengan predikat A dari target yang ditetapkan sebesar 88,64/A atau tingkat capaian sebesar 100,03 % .

Interpretasi Nilai SKM

Nilai Interval	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1.00 – 1.75	25 – 43.75	D	Tidak Baik
1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	C	Kurang Baik
2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Baik
3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	A	Sangat Baik

Faktor penyebab tercapainya target IKM antara lain :

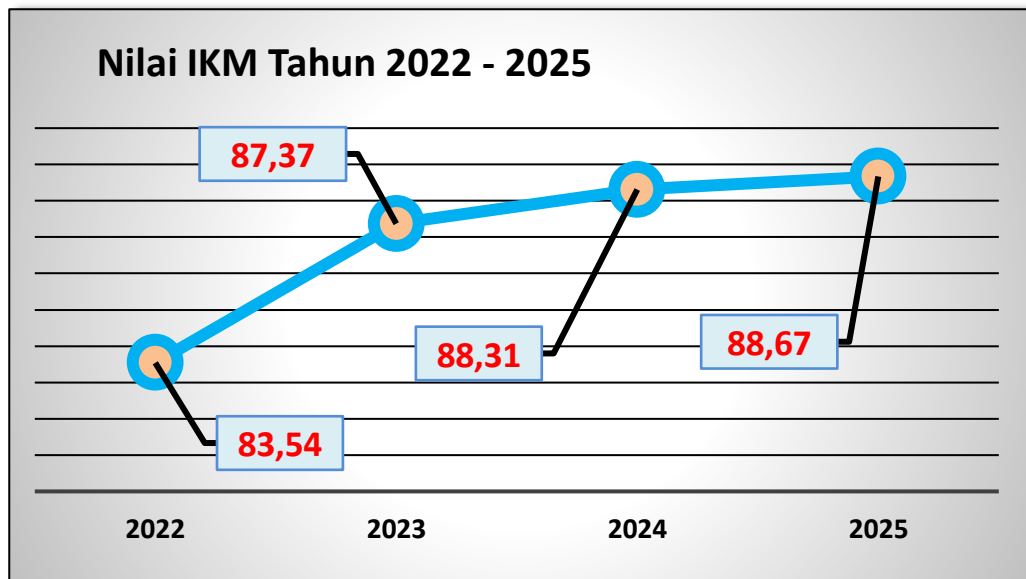
1. Penyederhanaan pelayanan dengan menyederhanakan SOP dan alur pelayanan agar lebih mudah dipahami
2. Penyusunan ulang informasi persyaratan secara sederhana dan di publikasikan melalui website/Instagram/desk layanan .
3. Peningkatan layanan pengaduan (SP4N Lapor) serta pengelolaan dokumen dan informasi (PPID) .

Nilai IKM tahun 2022 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



No.	Tahun	Nilai/Predikat	Keterangan
1.	2022	83,54/A	Sangat Baik
2.	2023	87,37/A	Sangat Baik
3.	2024	88,31/A	Sangat Baik
4.	2025	88,67/A	Sangat Baik

Sumber data : Laporan IKM Tahun 2022 – 2025



Sumber data : Laporan IKM Tahun 2022 – 2025

Perbandingan target dan realisasi tahun 2021-2025 serta target capaian jangka menengah Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi			2025			Target Renstra	
	2022	2023	2024	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,54 A	87,37 A	88,31 A	88,64 A	88,67 A	100,03 %	88,83 A	100 %



Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian Sasaran 5 :

- Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan : Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
- Kegiatan : Administrasi keuangan perangkat daerah
- Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah
- Kegiatan : Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
- Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Alokasi Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp sebesar 4.802.385.402,- dengan beberapa item kegiatan yang dilaksanakan disajikan pada tabel berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.160.000	Konsumsi rapat, cetak dan penggandaan penyusunan laporan capaian kinerja dan evaluasi kinerja
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.099.539.412	Belanja gaji dan tunjangan ASN dan P3K
3.	Administrasi umum perangkat daerah	63.904.240	Belanja ATK, alat Listrik, cetak, penggandaan dan perjalanan dinas rakor
4.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	38.292.300	Pengadaan 2 unit laptop dan 1 unit printer
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	322.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, Listrik, internet, dan surat menyurat



6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	270.489.450	Penyediaan jasa pemeliharaan, BBM, suku cadang dan pajak kendaraan dinas jabatan dan operasional
----	---	-------------	--

Berikut tabel target dan realisasi anggaran tahun 2025 pada program dan kegiatan penunjang sasaran 5 :

Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.802.385.402	4.329.175.426	90,15
1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8.160.000	8.092.000	99,17
2. Administrasi keuangan perangkat daerah	4.099.539.412	3.691.046.931	90,04
3. Administrasi umum perangkat daerah	63.904.240	58.515.976	91,57
4. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	38.292.300	38.039.700	99,34
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	322.000.000	309.653.896	96,17
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	270.489.450	223.826.923	82,75

C. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :



- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja (Perangkat Daerah) Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks domain tata Kelola SPBE	2,70	2,70	100,00 %
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100,00%	100,00%	100,00 %
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,25	2,25	100,00 %
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan TTE	100,00%	100,00%	100,00 %
5	Meningkatnya Tata Kelola DKISP	Nilai dan predikat SAKIP	79,55/BB	80,30/A	100,94 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	88,64/A	88,67/A	100,03 %
CAPAIAN KINERJA					100,16 %



Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program Pendukung	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Tingkat Efisiensi
Indeks domain tata Kelola SPBE	2,70	2,70	100 %	Aplikasi Informatika	799.759.140	752.096.399	94,04	5,96 % (Efisien)
Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 %	100 %	100 %	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.039241.700	1.014.919.302	97,66	2,34 % (Efisien)
Indeks Pembangunan Statistik	2,25	2,25	100 %	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	62.706.000	56.469.840	90,05	9,95 % (Efisien)
Persentase PD yang mengimplementasikan TTE	100 %	100 %	100 %	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	10.355.000	9.207.500	88,92	11,08 % (Efisien)
Nilai dan predikat SAKIP	79,55/BB	80,30/A	100,94 %	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.802.385.402	4.329.175.426	90,15	10,34 % (Efisien)
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,64/A	88,67/A	100,03 %					
Total Capaian Indikator Kinerja			101,27 %	Total Capaian Program Pendukung	6.714.447.242	6.161.868.467	91,77	9,50 % (Efisien)

Tabel 3.6
Analisis Dukungan SDM dalam
Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dukungan Personil Pencapaian Sasaran			Jumlah
			ASN	P3K	Non ASN	
1	Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks domain tata Kelola SPBE	9	-	16	23
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	3	-	-	3



3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik	3	1	-	4
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan TTE	1	-	-	1
5	Meningkatnya Tata Kelola DKISP	Nilai dan predikat SAKIP	7	2	4	13
		Indeks Kepuasan Masyarakat				
Jumlah			23	3	20	46

Berdasarkan data keuangan yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2025, maka realisasi dari capaian keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Realisasi Keuangan Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Outcome/Output	Keuangan		Capaian (%)	
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
I.	Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik					
	Program Aplikasi Informatika					
	1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
	a	Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	223.980.740	197.820.469	88,32
	b	Pembangunan dan/atau Pengembangan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai	127.679.900	109.818.400	86,01



		Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE			
	c	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	448.098.500	444.457.530	99,19
Jumlah Sasaran 1				799.759.140	752.096.399	94,04
II.	Sasaran 2 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik					
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	a	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	56.780.000	56.723.500	99,90
	b	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	33.066.600	24.662.750	74,59
	c	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	949.395.100	933.533.052	98,33
Jumlah Sasaran 2				1.039241.700	1.014.919.302	97,66
III.	Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral					
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						
1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						
	a	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	12.129.000	11.288.500	93,07
	b	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data	46.232.500	41.306.340	89,34



		c	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	4.344.500	3.875.000	89,19
	Jumlah Sasaran 3				62.706.000	56.469.840	90,05
IV.	Sasaran 4 : Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah						
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi						
	1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang ditetapkan baik berupa Peraturan, Keputusan maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	6.167.500	5.782.500	93,76
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	4.187.500	3.425.000	81,79
	Jumlah Sasaran 4				10.355.000	9.207.500	88,92
V.	Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola DKISP						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.800.000	1.785.000	99,17
		b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	1.785.000	99,17
		c	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.560.000	4.522.000	99,17
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
		a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.040.613.412	3.637.980.931	90,04



	b	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	58.926.000	53.066.000	90,06
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2.991.300	2.962.464	99,04
	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	29.996.940	26.984.201	89,96
	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	9.999.700	8.405.386	84,06
	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	6.000.000	5.950.000	99,17
	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.916.300	14.213.925	95,29
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	38.292.300	38.039.700	99,34
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.852.000	92,60
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	320.000.000	307.801.896	96,19
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10.489.450	10.470.800	99,82
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	240.000.000	193.393.523	80,58



	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20.000.000	19.962.600	99,81
Jumlah Sasaran 5				4.802.385.402	4.329.175.426	90,15
Total target, realisasi dan capaian anggaran Sasaran 1-5				6.714.447.242	6.161.868.467	91,77

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.161.868.467,-** dari total anggaran sebesar **Rp. 6.714.447.242,-** sehingga serapan capaian menunjukkan angka **91,77 %**.

Selanjutnya untuk perbandingan anggaran dari masing-masing sasaran strategis dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Anggaran Sasaran Strategis

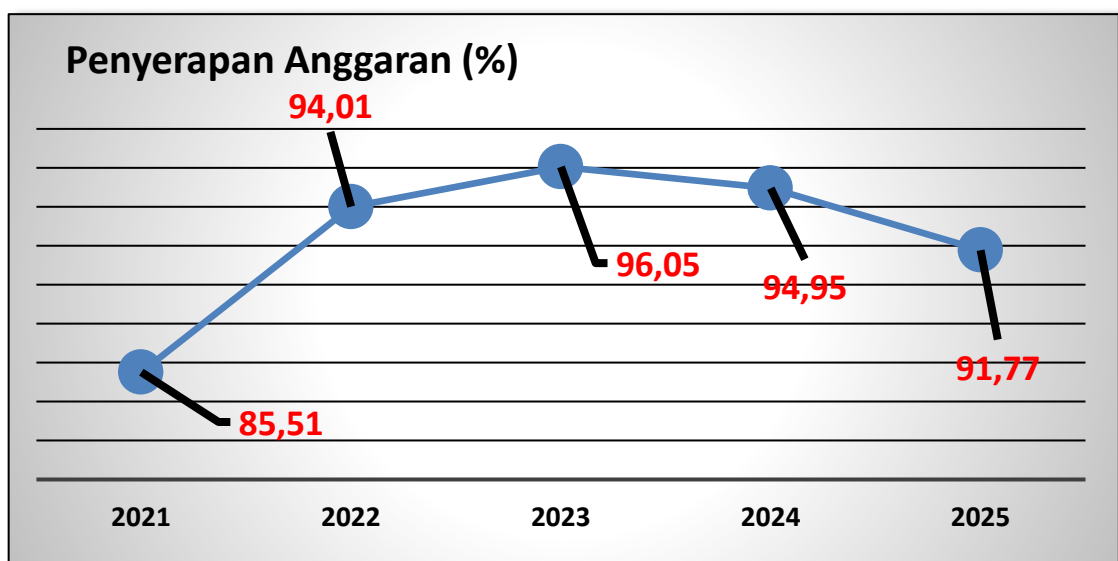
No.	Sasaran Strategis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	799.759.140	752.096.399	94,04
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1.039241.700	1.014.919.302	97,66
3	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektoral	62.706.000	56.469.840	90,05
4	Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	10.355.000	9.207.500	88,92
5	Meningkatnya Tata Kelola DKISP	4.802.385.402	4.329.175.426	90,15
Total Capaian Anggaran		6.714.447.242	6.161.868.467	91,77



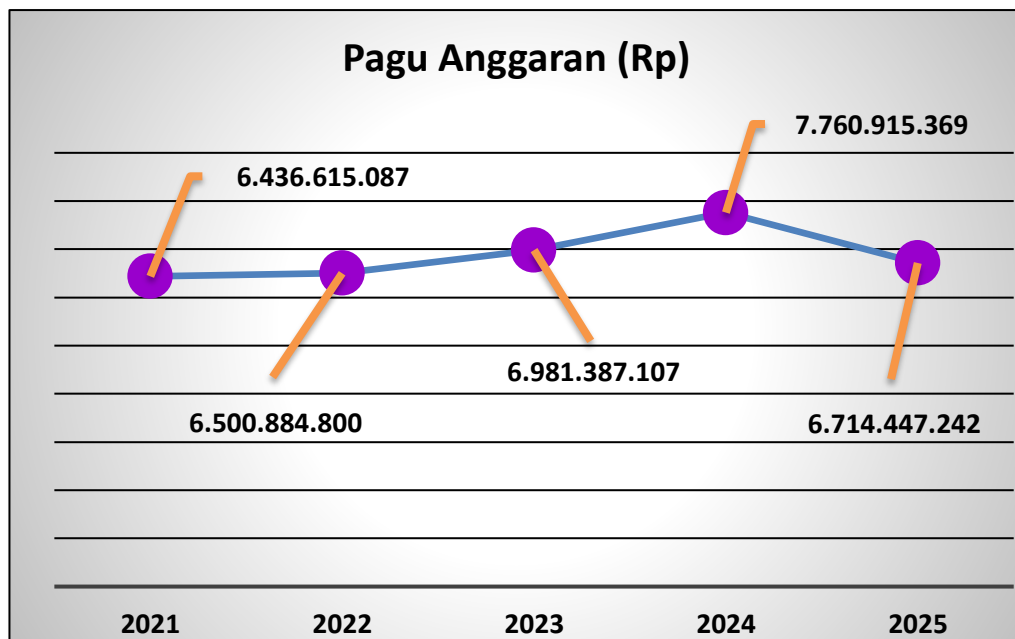
Perbandingan anggaran, realisasi, sisa anggaran dan persentase capaian realisasi anggaran pada Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang bersumber dari dana APBD Kota Tarakan Tahun 2021 s/d 2025, diisajikan dalam tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
Laporan Konsolidasi Pelaksanaan Pembangunan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase realisasi(%)
1	2021	6.436.615.087	5.504.052.973	932.562.114	85,51
2	2022	6.500.884.800	6.111.168.153	389.716.647	94,01
3	2023	6.981.387.107	6.705.604.815	275.782.292	96,05
4	2024	7.760.915.369	7.368.771.950	392.143.419	94,95
5	2025	6.714.447.242	6.161.868.467	552.578.775	91,77



Grafik Trend Penyerapan Anggaran tahun 2021 – 2025 DKISP Kota Tarakan



Grafik Trend Pagu Anggaran Tahun 2021 – 2025 DKISP Kota Tarakan

D. Daftar Penghargaan

Selama tahun 2025 Pemerintah Kota Tarakan maupun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menerima penghargaan terkait urusan komunikasi dan informatika, beberapa penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Penghargaan diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) kepada Pemerintah Kota Tarakan untuk kategori Kota/Kabupaten dengan Nilai Tertinggi IMDI untuk Kawasan Indonesia Bagian Tengah



03/10/2025 0 comments

WUJUD TRANSFORMASI DIGITAL, TARAKAN RAIH IMDI 2025

JAKARTA - Kota Tarakan kembali memperoleh apresiasi di tingkat nasional dengan meraih Anugerah Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2025....

 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Selamat atas Penghargaan

Anugerah IMDI

Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Kategori
Tertinggi IMDI pada kawasan Indonesia Bagian Tengah



 www.tarakankota.go.id



2. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Penghargaan diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 kategori Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anugrah yang diperoleh Badan Publik Cukup Informatif dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .





3. Penghargaan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

Penghargaan diberikan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada Ibu Endah Sarastiningsih, S.Pd., M.Pd (Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan) dengan inovasi Selamatkan Audita sebagai Juara II Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan pada Lomba Inovasi Daerah Kota Tarakan Tahun 2025





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 yang terdiri dari 5 sasaran dan 6 Indikator, adalah sebagai berikut :

- ❖ Sasaran 1 Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik dengan indikator Indeks domain tata Kelola SPBE capaian 100 %

- ❖ Sasaran 2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Persentase penyelesaian permohonan informasi publik capaian 100 %

- ❖ Sasaran 3 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Statistik Sektorial dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik capaian 100 %

- ❖ Sasaran 4 Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi kan TTE capaian 100 %



- ❖ Sasaran 5 Meningkatnya Tata Kelola DKISP dengan indikator 1 Nilai dan predikat SAKIP capaian 100,94 % dan indikator 2 Indeks Kepuasan Masyarakat capaian 100,03 %

B. Tindak Lanjut Perbaikan dan Peningkatan Kinerja

1. Menetapkan Target Keberhasilan sesuai dengan Indikator Tujuan dan Sasaran serta dokumen LAKIP akan dijadikan bahan evaluasi didalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya .
2. Dokumen LAKIP akan dipublikasikan pada Website resmi DKISP Kota Tarakan dengan laman <http://dkisp.tarakankota.go.id/> sehingga memudahkan publik/masyarakat untuk mengakses atau memperoleh informasi .
3. Melengkapi dokumen LAKIP dengan didukung basis data yang kompeten, dapat diverifikasi, dapat ditelusuri sumber datanya, up to date dan dapat dibandingkan dengan capaian sasaran dari daerah lain, regional serta nasional sebagaimana rekomendasi dalam LHE Sakip oleh Inspektorat Kota Tarakan .
4. Melakukan koordinasi dengan PD lain terkait pemanfaatan ruangan NOC dan Data Center untuk penyimpanan server aplikasi demi perlindungan keamanan yang lebih baik .



5. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan PD dalam penyusunan dan pemanfaatan data Statistik Sektoral Kota Tarakan serta perlindungan keamanan informasi .
6. Meningkatkan integrasi data sektoral sehingga kecepatan dan akurasi penyajian data dapat diwujudkan .
7. Melaksanakan publikasi dan desiminasi informasi yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan semua jaringan/saluran komunikasi dan informasi yang tersedia .
8. Meningkatkan layanan kegawat daruratan call center 112 UPT Tarakan Command Center